

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945 ) menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Bentuk Pemerintahan Republik itu sendiri terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>1</sup> Di Indonesia hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 18 A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraannya diberi kebebasan dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atas desentralisasi ini diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) adalah

---

<sup>1</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 88

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemerintah Daerah terdiri dari daerah-daerah otonom yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah otonom. Daerah otonom berdasarkan pada Pasal 1 angka 12 UU Pemda adalah “daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya secara luas, tetapi tetap dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia”.

Penyelenggara pemerintahan daerah menurut Pasal 57 UU Pemda adalah Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Di dalam Pasal 209 UU Pemda, perangkat daerah Provinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. Sedangkan perangkat daerah Kabupaten atau Kota terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati

dan untuk kota disebut wakil walikota.<sup>2</sup> Kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki tugas dan wewenang yang berbeda yang diatur di dalam Pasal 65 dan 66 UU Pemda.

Salah satu wewenang yang dimiliki oleh Bupati sebagai kepala daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, kepala daerah kabupaten yakni Bupati memiliki wewenang dalam mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Kepegawaian di Indonesia “ mengemukakan bahwa :

“Tindak lanjut dari adanya penyerahan wewenang manajemen ASN kepada daerah adalah masing-masing daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota berhak mengatur urusan kepegawaiannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta aspirasi masyarakatnya. Gubernur dan Bupati/ Walikota sebagai PPKD yang berwenang untuk mengatur pembinaan manajemen kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Pemda”.<sup>3</sup>

Hal ini berarti bahwa masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren dalam hal pembinaan manajemen ASN dengan melakukan penataan kembali (*right sizing*) manajemen kepegawaian di daerah.<sup>4</sup>

Dalam hal Bupati berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Wakil Bupati dapat menggantikan kepala daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 65 ayat (4) UU Pemda yakni : ”dalam hal kepala daerah sedang

---

<sup>2</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 55.

<sup>3</sup> Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 164.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

menjalani masa tahanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah”. Selanjutnya di dalam Pasal 66 ayat (3) UU Pemda disebutkan bahwa Wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Wakil Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah yang berhalangan memperoleh kewenangan berdasarkan mandat yang menurut Pasal 14 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan diperoleh apabila :

- a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya;
- b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Wakil Bupati yang menggantikan Bupati yang berhalangan melaksanakan tugas dan wewenangnya disebut juga dengan Pelaksana Harian Bupati. Berdasarkan Pasal 14 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan), Pelaksana Harian Bupati yang mana sebagai pejabat yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan/tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. .

Di dalam kenyataannya, terjadi pengangkatan Pejabat Pegawai Negeri Sipil oleh Wakil Bupati yang pada saat terjadinya pengangkatan tersebut berkedudukan sebagai Pelaksana Harian dari Bupati. Hal ini terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana pada tanggal 18 Agustus 2017 Pelaksana Harian Bupati Ferizal Ridwan melantik sejumlah pejabat eselon II dan Sekretaris Daerah [selanjutnya disebut Sekda] yang telah diberhentikan oleh



Bupati Irfendi Arbi sesaat sebelum Bupati menjalani cuti untuk berangkat menunaikan ibadah Haji tanpa adanya sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.<sup>5</sup>

Sebelum berangkat untuk menunaikan ibadah haji, Bupati Irfendi Arbi di hadapan ASN, Wakil Bupati Ferizal Ridwan, Ketua DPRD dan Forkopimda [Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,] dalam acara Peringatan Hari Koperasi dan Anti Narkoba di Ibu Kota Kabupaten Sarilamak, meminta tidak ada pelantikan. Dalam surat yang ditandatangani Bupati Irfendi Arbi, di poin kedua ditegaskan, Pelaksana Harian tidak boleh menjalankan kebijakan yang bersifat penting seperti halnya mutasi.<sup>6</sup>

Sebelum melaksanakan cuti, Bupati telah memutasi tanpa jabatan (Non Job) Sekda Yendri Thomas dan telah mengangkat M. Yunus pada tanggal 26 Mei 2017 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kabupaten. Pelantikan kembali Sekda tersebut menimbulkan permasalahan dimana ada dua orang Sekda dalam waktu bersamaan pada penyelenggaraan pemerintahan, yakni Plt Sekda yang telah dilantik oleh Bupati sebelum Bupati cuti dan Sekda yang dilantik oleh Plh. Bupati.

Tindakan yang diambil oleh Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Ferizal Ridwan ini dinilai tidak sesuai dengan SK Pelimpahan Kewenangan Bupati Lima Puluh Kota kepada Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa kedudukan Wakil Bupati adalah melaksanakan tugas-tugas Bupati selama Bupati cuti menunaikan ibadah haji. Kedudukan Wakil Bupati tidak

---

<sup>5</sup> Harian Singgalang, dipublish pada Sabtu, 19 Agustus 2017

<sup>6</sup> *Ibid.*,

berubah, walaupun telah ada SK pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai pengisian jabatan Sekretaris Daerah oleh Wakil Bupati sebagai Pelaksana Harian Bupati yang sedang dalam masa cuti untuk mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini penulis beri judul **“PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DAERAH OLEH PELAKSANA HARIAN BUPATI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimana konsekuensi hukum pengisian jabatan Sekretaris Daerah oleh Pelaksana Harian Bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana penyelesaian pengisian jabatan Sekretaris Daerah oleh Pelaksana Harian Bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsekuensi hukum pengisian jabatan Sekretaris Daerah oleh Pelaksana Harian Bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pengisian jabatan Sekretaris Daerah oleh Pelaksana Harian Bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh dari lapangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai pengisian jabatan sekretaris daerah oleh pelaksana harian bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami tentang pengisian jabatan sekretaris daerah oleh pelaksana harian bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai pengisian jabatan sekretaris daerah oleh pelaksana harian bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan konsekuensi hukum pengisian jabatan Sekretaris Daerah oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati.

c. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi. Kabupaten/Kota, masyarakat umum, pihak yang bekerja di bidang hukum khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam kegiatan penelitian ini dibutuhkan data yang konkret, akurat, valid, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara :

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>7</sup> Dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang konsekuensi hukum pengisian jabatan Sekretaris Daerah oleh Pelaksana Harian Bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota dan bagaimana penyelesaian pengisian jabatan Sekretaris Daerah oleh Pelaksana Harian tersebut.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian efektivitas hukum yaitu penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan

---

<sup>7</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.72-79.



antara realitas hukum dengan ideal hukum.<sup>8</sup> Penelitian efektivitas hukum adalah melihat pengaruh positif dari hukum yaitu orang bertingkah laku sesuai dengan aturan hukum.

### 3. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.<sup>9</sup> Dalam hal ini menggambarkan tentang pelaksanaan pengisian jabatan sekretaris daerah oleh pelaksana harian bupati dibandingkan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Aparatur Pemerintah dan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

### 4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat lokasi penelitian yang dipilih adalah Biro Hukum Kantor Gubernur Sumatera Barat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota serta Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.

### 5. Sumber dan Jenis Data

#### a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

*Field Research* atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan.

#### b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 137.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Pers), Jakarta, 1986, hlm. 10.

*Library Research* atau penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti yang ada pada buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Adapun data yang diperoleh dapat melalui :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.
- 3) Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.

Jenis Data :

Data yang terkumpul merupakan data kuantitatif yaitu pengumpulan data dalam jumlah besar dan mudah dikualifikasikan ke dalam kategori-kategori.<sup>10</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.<sup>11</sup> Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persoalan penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dengan studi atas penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 49.

<sup>11</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2.

dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- e) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- i) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K-26-30/V.20-3/99 tertanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.
  - j) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K-26-30/V.20-3/99 tertanggal 19 Oktober 2015 tentang Penjelasan atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian.
  - k) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 130/201/Pem-2017
  - l) Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 436 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Bupati Lima Puluh Kota Kepada Wakil Bupati Lima Puluh Kota.
  - m) Surat Keputusan Plh Bupati Lima Puluh Kota Nomor 130/23/TAPUM-2017
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara



Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah, serta ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*). Dalam wawancara semi terstruktur peneliti menentukan apa saja pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Dari jawaban responden muncul jawaban lain untuk melengkapi atau mendalami jawaban sebelumnya sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. dalam hal ini yang diwawancarai adalah Desi Ariati, SH Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Kantor Gubernur Sumatera Barat, Eri Fortuna, SH Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Aneta Budi Putra, AP.MSi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mengumpulkan data berdasarkan tulisan, arsip, buku hukum yang memuat pendapat, teori, dalil hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif studi dokumen ini berfungsi sebagai cara pengumpulan data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional berdasarkan pendapat, teori, dalil hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menerima maupun yang menolak hipotesa tersebut

7. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah sarana yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data dan bertujuan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis.

Alat pengumpul data yang digunakan terdiri dari pedoman wawancara.

#### 8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan data dimulai setelah seluruh data yang diperlukan terpenuhi dengan lengkap. Data yang terkumpul dipilah-pilah berdasarkan relevansi dan kegunaannya dalam penelitian ini. Setelah data dikelompokkan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya kemudian diolah dan dijabarkan secara akurat.
- b. Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>12</sup> Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.37

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.107